

PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF MELALUI KETIMPAGAN PENDAPATAN DI SUMATERA BARAT

Nahda Fidarsih¹, Novya Zulva Riani²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

***Korespondensi:** nfidarsiho2@gmail.com, novyazulvariani@fe.unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

1 November 2025

Disetujui:

2 November 2025

Terbit daring:

5 November 2025

DOI: -

Sitasi:

Fidarsih, N. & Riani, N. Z. (2025). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Ketimpangan Pendapatan

Abstract:

This research aims to analyze the influence of balancing funds on inclusive economic growth in West Sumatra from 2018 to 2023. The approach used is quantitative with panel data regression methods, utilizing secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and Ministry of Finance data. The variables studied include General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), and Profit Sharing Funds (DBH) and their impact on inclusive economic growth in overcoming income inequality in 19 districts/cities in the Sumatra region West. Simultaneous estimation results show that balancing funds have a significant effect on inclusive economic growth through income inequality. The results of this research highlight the importance of government policy in equalizing balancing funds so that they are felt by all levels of society and can reduce income inequality.

Keywords : *balancing fund, inclusive economic growth, income inequality*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat dari tahun 2018 hingga 2023. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode regresi data panel, memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Kementerian Keuangan. Variabel yang diteliti mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dalam mengatasi ketimpangan pendapatan di 19 kabupaten/kota di wilayah Sumatera Barat. Hasil estimasi secara simultan menunjukkan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif melalui ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah dalam pemerataan dana perimbangan agar dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci : *dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi inklusif, ketimpangan pendapatan*

Kode Klasifikasi JEL: D31,H7,H5,H4,O47

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi menjadi isu utama dalam pembangunan ekonomi jangka panjang yang menjadi fokus perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan output perkapita yang mencerminkan peningkatan output perkapita yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini memberikan peluang yang lebih besar untuk konsumsi barang dan jasa serta meningkatkan daya beli (Hartati, 2021). Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidaklah cukup jika diimbangi dengan pemerataan manfaat yang inklusif, dimana semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan merasakan hasil dari pembangunan tersebut (Klasen, 2010). Dengan kata lain meskipun pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat menunjukkan kemajuan, penting untuk memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat.

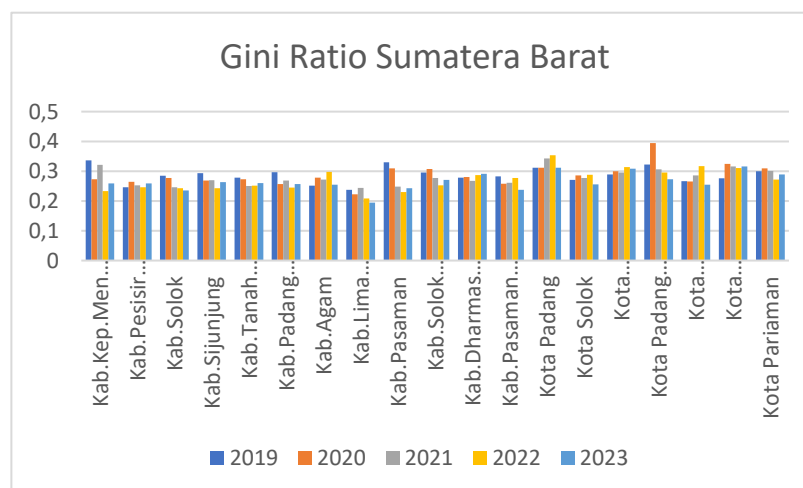
Di Indonesia, khususnya di provinsi Sumatera Barat, meskipun pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan stabilitas dalam beberapa tahun terakhir, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan sifat inklusif. Berbagai isu sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, masih menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Konsep pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengharuskan adanya pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sebagai hasil nyata dari proses pembangunan ekonomi. Pemerintah yang berkualitas, bersama dengan tata kelola yang baik dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terbukti dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan (Liu et al., 2018).

Menurut Aimon et al., (2020), berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik untuk periode 2015-2020, indeks pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat mencatat skor rata-rata 6,13. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi di provinsi cukup memuaskan, manfaat dari pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Sumatera Barat menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan, yang berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Giofano et al., (2024), Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Talaud telah menunjukkan sifat inklusif antara tahun 2018 sampai 2021. Temuan ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi inklusif yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu bersifat inklusif agar dapat mengurangi kemiskinan di kabupaten Talaud. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin terciptanya keadilan sosial, terutama terkait dengan distribusi pendapatan. Oleh karena itu pendapatan pertumbuhan ekonomi inklusif diperkenalkan untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan dapat dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Hapsari et al., 2013).

Ketimpangan pendapatan adalah masalah yang dihadapi oleh semua negara. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator dapat menjadi sumber masalah sosial jika dipahami sebagai konsep pembangunan ekonomi (Est & São, 2012). Tujuan pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi, karena hal ini dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan. Manfaat dari pertumbuhan ekonomi sering kali hanya dirasakan oleh segelintir masyarakat, yang pada gilirannya dapat menimbulkan berbagai masalah sosial (Ncube et al., 2013).

Gambar 1. 1 Tingkat Gini Ratio Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat



Kondisi di Sumatera Barat memperlihatkan bahwa meskipun indikator makroekonomi seperti PDRB per kapita mengalami peningkatan, ketimpangan pendapatan masih menjadi isu penting dalam pembangunan daerah. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa koefisien Gini di beberapa kabupaten/kota masih berada di atas angka 0,25, yang mencerminkan adanya ketimpangan distribusi pengeluaran masyarakat. Misalnya, Kota Padang Panjang mencatatkan gini ratio tertinggi, sedangkan Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada posisi paling rendah dengan gini ratio 0,194.

Menurut penelitian Hunaifi, (2022) yang mengeksplorasi pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di enam provinsi di pulau jawa, ditemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif di keenam provinsi tersebut.

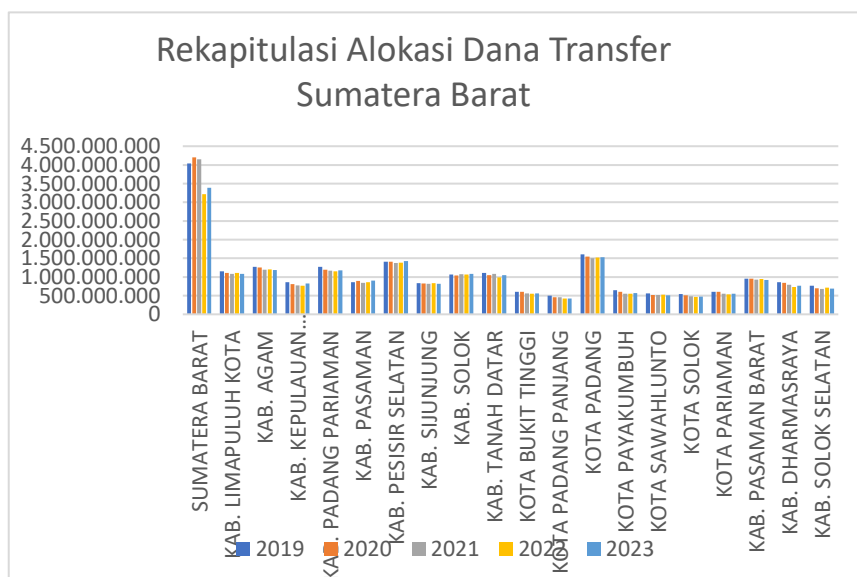
Penelitian pusat telah mengalokasikan berbagai jenis data transfer ke daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembangunan inklusif. Tiga instrumen utama dalam dana tersebut yaitu :

Pertama, Dana Alokasi Umum (DAU), bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah. Di Sumatera Barat, alokasi DAU telah meningkat dalam lima tahun terakhir. Namun, tidak semua daerah menunjukkan peningkatan kesejahteraan secara signifikan. Beberapa kabupaten dengan DAU besar tetap mencatat angka kemiskinan yang tinggi.

Kedua, Dana Alokasi khusus (DAK), Dana ini bertujuan untuk kegiatan sektoral tertentu seperti Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, dan pertanian. Namun disparitas dalam efektivitas DAK di Sumatera Barat terlihat jelas. Beberapa daerah masih tertinggal meskipun menerima alokasi DAK yang cukup besar.

Ketiga, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana ini bersumber dari penerimaan negara atas pajak dan sumber daya alam. Daerah penghasil menerima proporsi DBH yang lebih besar. Namun, di Sumatera Barat, Sebagian besar daerah bukan merupakan penghasil utama sumber daya alam strategis. Akibatnya, DBH cenderung lebih kecil dan tidak cukup kuat untuk mengakses Pembangunan ekonomi setempat secara mandiri.

Gambar 1. 2 Rekapitulasi Alokasi Dana Transfer di Sumatera Barat



Dari gambar tersebut, terlihat bahwa jumlah total alokasi dana untuk Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun tetap berada pada kisaran yang tinggi, menunjukkan besarnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah ini. Di antara daerah kabupaten dan kota, beberapa daerah menerima alokasi dana yang relatif besar secara konsisten, seperti Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Daerah-daerah ini cenderung memiliki luas wilayah yang besar, jumlah penduduk yang tinggi, atau kebutuhan fiskal yang signifikan. Sementara itu, beberapa daerah seperti Kota Solok, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Solok menerima alokasi dana yang lebih kecil, yang dapat mencerminkan karakteristik wilayah yang lebih kecil dan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Meskipun demikian, alokasi dana untuk hampir semua daerah tampak mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2019 hingga 2023, menunjukkan adanya tren pertumbuhan dana transfer yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.

Namun, besarnya alokasi dana tidak otomatis menjamin tercapainya pertumbuhan inklusif. Berdasarkan penelitian Aimon et al. (2020), pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan inklusif dalam kemiskinan dalam jangka panjang, namun justru dapat mengganggu keseimbangan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, efektivitas pengeluaran pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sangat bergantung pada bagaimana dana tersebut dialokasikan—khususnya untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan investasi infrastruktur yang terbukti berpengaruh signifikan. Disparitas alokasi antar daerah juga perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kebutuhan riil masing-masing daerah menjadi pertimbangan utama dalam distribusi dana transfer.

Menurut penelitian Sihombing et al, (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI). Ini berarti bahwa kedua jenis dana transfer tersebut lebih efektif dalam meningkatkan akses terhadap layanan publik, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan proses pertumbuhan ekonomi yang menitikberatkan pada penciptaan peluang ekonomi agar manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh individu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Raheem et al., 2018), disebutkan bahwa salah satu faktor kunci yang tidak boleh diabaikan dalam membangun perekonomian, khususnya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah pengembangan sumber daya manusia.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah pertumbuhan yang meluas antar sektor dan intensif terhadap tenaga kerja. Dengan begitu pertumbuhan inklusif dapat dikatakan sebagai pertumbuhan yang melibatkan partisipasi semua pihak tanpa diskriminasi dan mampu melibatkan seluruh sektor ekonomi. Fokus kedua yaitu pada hasil dari proses pertumbuhan. Dalam hal ini, konsep pertumbuhan inklusif berkaitan erat dengan konsep pertumbuhan yang pro poor

Teori Konvergensi

Secara umum, konvergensi dalam penelitian ini dipahami sebagai proses pengurangan kesenjangan pendapatan antar daerah. Hal ini juga dapat diartikan sebagai proses "pengejaran" ketertinggalan daerah berpenghasilan rendah terhadap daerah berpenghasilan tinggi, di mana kesenjangan pendapatan dihitung berdasarkan pendapatan riil per kapita.

Teori konvergensi menyatakan bahwa tingkat kemakmuran antara negara-negara maju dan berkembang pada suatu titik akan bertemu, atau terjadi catching up effect. Ini didasarkan pada asumsi bahwa negara-negara maju akan mencapai kondisi steady state, di mana tingkat pendapatan tidak dapat lagi meningkat karena seluruh biaya produksi telah tertutupi oleh investasi yang ada, sehingga tambahan tabungan tidak lagi dapat dijadikan investasi tambahan.

Konvergensi pada umumnya terdiri dari α -convergence dan β -convergence. Konvergensi sigma (α -convergence) adalah ukuran paling konvensional untuk mengukur tingkat kesenjangan antar daerah pada periode tertentu. Para peneliti mengukur konvergensi sigma melalui dispersi yang terjadi antar perekonomian, diukur berdasarkan standar deviasi dari pendapatan riil per kapita antar daerah. Apabila dispersi pendapatan riil antar provinsi menurun, maka dapat dikatakan terjadi konvergensi pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika tingkat dispersi pendapatan riil per kapita antar provinsi meningkat, maka terjadi dispersi, yang mengindikasikan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah miskin dalam mengejar daerah kaya. Sementara itu, konvergensi beta (β -convergence) terjadi manakala perekonomian daerah miskin cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah yang relatif kaya. Ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara

Teori Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai pelimpah wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pelaksanaannya, penerimaan daerah dalam konteks desentralisasi mencakup pendapatan daerah serta pembiayaannya (Mahi, 2019).

Menurut Oates (1972), Desentralisasi Fiskal berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah, sebagai otoritas di tingkat subnasional, cenderung lebih efisien dalam memproduksi dan menyediakan layanan public. Pengambilan Keputusan yang dilakukan di tingkat lokal (kabupaten/kota) juga dinilai lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mampu menciptakan keberagaman pilihan kebijakan yang lebih sesuai dan mendukung efisiensi alokasi sumber daya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah yang masih tertinggal secara pembangunan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk mengkaji pengaruh dana alokasi transfer ke daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di kabupaten/kota di Sumatera Barat pada rentang waktu 2018 hingga 2023. Wilayah cakupan penelitian mencakup 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa provinsi Sumatera Barat memiliki pertumbuhan ekonomi yang fluktuasi dan juga menghadapi ketimpangan yang relevan untuk dianalisis dalam konteks pertumbuhan ekonomi inklusif.

Jenis data ketimpangan pendapatan yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu juga data juga diperoleh

dari Kementrian Keuangan untuk melihat data Aalokasi dana transfer ke daerah. Data disusun dalam format panel, yaitu gabungan antara data time series (tahun 2018–2023) dan cross section (19 kabupaten/kota).

Tabel 1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran / Satuan
Variabel Dependen		
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif terhadap Ketimpangan	Data ini dibentuk menggunakan Pdb perkapita, gini ratio dan membagi 40 persen pengeluaran penduduk terendah $IG_{em} = \left(\frac{E_{em.g}}{E_{em}} \right) G_g$	-
Variabel Independen		
Dana Alokasi umum (DAU)	Jumlah dana yang diterima oleh pemerintah daerah untuk belanja rutin dan layanan dasar	Rupiah
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah dana untuk membiayai kegiatan khusus di daerah sesuai prioritas nasional	Rupiah
Dana Bagi Hasil (DBH)	Jumlah dana yang diterima daerah berdasarkan proporsi kontribusi terhadap penerimaan negara dari sumber daya tertentu	Rupiah

Analisis data menggunakan metode data panel yang mengintegrasikan dimensi waktu san wilayah kabupaten/kota untuk menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Teknik regresi dta panel diterapkan untuk menguji pengaruh signifikan variabel bebas terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam analisis ini dilakukan pemilihan model estimasi terbaik (Common Effect, Fixed Effect, atau Random Effect) melalui serangkaian uji, termasuk uji chow, uji Hausman, uji Lagrange Multiplier (LM). Seluruh proses analisis dibantu oleh perangkat lunak Stata. Sebelum dikakukannya estimasi, dilakukan pemeriksaan asumsi klasik seperti uji Multikolinearitas dan uji Heteroskedastisitas guna memastikan kendala hasil. Selanjutnya Hasil estimasi di analisis secara deskriptif untuk memahami faktor-faktor penentu pengaruh dana alokasi transfer ke daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dengan pendekatan dan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan bukti empiris yang mendalam terkait pengaruh dana alokasi transfer ke daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis deskriptif Pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengurangan ketimpangan pendapatan

Pertumbuhan ekonomi inklusif menuntut agar hasil pembangunan dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok. Karena itu, tingkat ketimpangan pendapatan menjadi indikator penting. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat disebut inklusif jika distribusi pendapatannya tidak merata. Semakin kecil ketimpangan yang terjadi, semakin besar pula kemungkinan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar menyentuh semua lapisan masyarakat.

Pertumbuhan inklusif terjadi ketika koefisien Pertumbuhan inklusif dalam ketimpangan pendapatan (IGin) memiliki nilai yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi (Gg). Koefisien pertumbuhan inklusif dalam ketimpangan pendapatan (IGin) dirangkum dalam Tabel di bawah ini

Tabel 2 Koefisien Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui pengurangan Ketimpangan (IGin) dan Pertumbuhan Ekonomi (Gg) di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Wilayah	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	IGin	Gg	IGin	Gg	IGin	Gg	IGin	Gg	IGin	Gg	IGin	Gg
Kab. Kepulauan Mentawai	0.023	0.029	0.051	0.017	0.119	0.046	0.097	0.013	0.237	0.033	0.054	0.025
Kab. Pesisir Selatan	0.064	0.045	0.024	0.036	0.025	0.083	0.033	0.019	0.001	0.025	0.022	0.027
Kab. Solok	0.049	0.045	0.057	0.039	0.009	0.051	0.081	0.021	0.018	0.030	0.011	0.031
Kab. Sijunjung	0.033	0.034	0.024	0.022	0.086	0.012	0.000	0.018	0.049	0.026	0.019	0.029
Kab. Tanah Datar	0.033	0.048	0.012	0.046	0.018	0.071	0.074	0.023	0.017	0.029	0.016	0.032
Kab. Padang Pariaman	0.054	0.049	0.001	0.014	0.081	-0.131	0.010	0.007	0.066	0.050	0.022	0.037
Kab. Agam	0.012	0.045	0.071	0.036	0.070	0.077	0.038	0.018	0.033	0.028	0.058	0.031
Kab. Lima Puluh Kota	0.036	0.043	0.091	0.036	0.034	0.007	0.034	0.022	0.084	0.028	0.028	0.033
Kab. Pasaman	0.008	0.039	0.125	0.031	0.043	0.061	0.139	0.018	0.028	0.024	0.013	0.028

Kab. Solok Selatan	0.005	0.032	0.079	0.022	-	-	0.058	0.057	0.071	0.014	0.050	0.021	0.037	0.027
Kab. Dharmasraya	0.023	0.026	0.016	0.009	0.001	0.088	0.003	0.017	0.000	0.024	0.008	0.025		
Kab. Pasaman Barat	0.025	0.032	0.041	0.014	0.067	0.029	0.034	0.021	0.020	0.026	0.107	0.028		
Kota Padang	0.006	0.047	0.069	0.035	0.000	0.036	0.067	0.023	0.008	0.030	0.114	0.033		
Kota Solok	0.035	0.039	0.049	0.027	-	-	0.027	0.033	0.015	0.015	0.008	0.023	0.072	0.026
Kota Sawahlunto	0.020	0.046	0.055	0.038	-	-	0.021	0.046	0.025	0.012	0.063	0.024	0.162	0.029
Kota Padang Panjang	0.030	0.046	0.079	0.033	-	-	0.093	0.049	0.156	0.019	0.049	0.029	0.052	0.033
Kota Bukittinggi	0.073	0.044	0.188	0.033	0.003	0.073	0.031	0.026	0.051	0.038	0.156	0.039		
Kota Payakumbuh	0.007	0.045	0.048	0.035	-	-	0.081	0.032	0.029	0.022	0.043	0.031	0.005	0.033
Kota Pariaman	0.035	0.043	0.018	0.035	-	-	0.003	0.062	0.043	0.024	0.075	0.033	0.043	0.036

Tabel.3 Kategori Inklusif atau Tidak Inklusif Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui pengurangan Ketimpangan (IGin) dan Pertumbuhan Ekonomi (Gg) di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif
Kab. Pesisir Selatan	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif
Kab. Solok	Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif
Kab. Sijunjung	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif
Kab. Tanah Datar	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif
Kab. Padang Pariaman	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif
Kab. Agam	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif
Kab. Lima Puluh Kota	Tidak Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif
Kab. Pasaman	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif

Kab. Solok Selatan	Tidak Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif
Kab. Dharmasraya	Tidak Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif
Kab. Pasaman Barat	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Kota Padang	Tidak Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Kota Solok	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Kota Sawahlunto	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif
Kota Padang Panjang	Tidak Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif
Kota Bukittinggi	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif
Kota Payakumbuh	Tidak Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif
Kota Pariaman	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif
Rata-rata	Tidak Inklusif	Inklusif	inklusif	Inklusif	Inklusif	Inklusif

Selama periode 2018–2023, inklusivitas ekonomi di Sumatera Barat mengalami fluktuasi yang cukup jelas. Pada awal periode, sebagian besar daerah masih belum inklusif karena pertumbuhan ekonomi belum diikuti pemerataan hasilnya. Ketimpangan pendapatan masih terasa, terutama di Tanah Datar, Agam, dan Padang Pariaman. Namun, mulai 2019, sejumlah daerah seperti Agam, Bukittinggi, dan Pasaman mulai beralih menjadi inklusif berkat peningkatan efektivitas Dana Alokasi Khusus di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pandemi pada 2020 sempat menekan aktivitas ekonomi, tetapi bantuan sosial dan stimulus fiskal membantu menahan ketimpangan di beberapa wilayah seperti Pasaman dan Kota Solok. Memasuki 2021, proses pemulihan ekonomi menurunkan Gini Ratio hingga 0,306, menunjukkan perbaikan distribusi pendapatan di banyak daerah.

Pada dua tahun terakhir, dinamika inklusivitas semakin terlihat. Tahun 2022 sempat menunjukkan penurunan, di mana beberapa daerah seperti Kota Padang dan Sijunjung kembali tidak inklusif akibat pemulihan ekonomi yang tidak merata. Namun, pada 2023 tren membaik, ditandai turunnya Indeks Gini menjadi 0,283 dan meningkatnya kesejahteraan di sejumlah kabupaten/kota seperti Mentawai, Bukittinggi, dan Sawahlunto. Perubahan ini menunjukkan bahwa keberhasilan inklusivitas sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan fiskal daerah, arah belanja publik, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong sektor produktif yang membuka lapangan kerja dan memperluas akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hasil analisis regresi data panel

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Common Effect Model (CEM).

Berdasarkan hasil regresi secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui pengurangan ketimpangan. Dengan kata lain, model regresi menunjukkan bahwa dana-dana tersebut secara kolektif memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Hal ini bisa terjadi karena alokasi dana tersebut tepat sasaran dan sudah hampir dinikmati disemua kalangan.

Tabel 3 Hasil Uji Fixed Effect Model

Y	Coefisient	Std err	t	P> t	[95% conf. interval]
X1	-.0306143**	.0148385	-2.06	0.041	-.0600268 -.001201
X2	.0035176	.0060605	0.58	0.563	-.0084953 .0155305
X3	.023923***	.0082323	2.91	0.004	.0076051 .0402408
-cons	.0273928	.2749747	0.70	0.928	-.3527141 .7373812

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil regresi secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui pengurangan ketimpangan. Dengan kata lain, model regresi menunjukkan bahwa dana-dana tersebut secara kolektif memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Hal ini bisa terjadi karena alokasi dana tersebut tepat sasaran dan sudah hampir dinikmati disemua kalangan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Ketimpangan Pendapatan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dengan koefisien sebesar -0,0306143 dan nilai signifikansi 0,041. Nilai ini berada di bawah batas $\alpha = 5\%$, sehingga pengaruhnya secara statistik nyata, meskipun arahnya negatif. Dengan kata lain, kenaikan DAU justru diikuti penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif sebesar 0,0324 poin.

Secara substansi, temuan ini mengindikasikan bahwa penambahan DAU belum efektif mendorong pertumbuhan yang merata. Salah satu penyebabnya ialah sebagian besar DAU masih digunakan untuk belanja pegawai dan kebutuhan rutin pemerintahan, bukan diarahkan ke kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, DAU pada dasarnya dirancang untuk membantu daerah memperkuat kapasitas keuangan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Namun kenyataannya, dominasi belanja rutin membuat fungsi redistributif dan mendorong pertumbuhan inklusif menjadi kurang optimal. Alhasil, tujuan untuk menciptakan pemerataan fiskal dan mendorong konvergensi antardaerah belum tercapai sepenuhnya.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Ketimpangan Pendapatan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai P-value 0,563. Angka ini jauh di atas taraf signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif melalui ketimpangan

pendapatan. Dengan kata lain, meskipun DAK dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, dampaknya belum mampu memperkecil kesenjangan pendapatan maupun mendorong pertumbuhan yang merata.

Secara teori, dalam kerangka desentralisasi fiskal, DAK seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Namun praktik di lapangan sering kali menunjukkan bahwa penggunaan DAK masih berorientasi pada proyek fisik yang bersifat administratif dan bukan pada penguatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menyebabkan perannya dalam menekan ketimpangan menjadi terbatas dan efektivitas desentralisasi fiskal belum tercapai sepenuhnya.

Dikaitkan dengan teori konvergensi, daerah yang menerima transfer fiskal lebih besar seharusnya tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalannya dibanding daerah lain. Akan tetapi, belum terlihat adanya penyempitan kesenjangan antarwilayah. Ini mengindikasikan bahwa proses konvergensi berjalan lambat atau bahkan belum terjadi, karena dana yang diterima tidak digunakan secara produktif dan masih terkendala birokrasi serta perencanaan yang kurang matang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hermawan (2020) yang menyatakan bahwa DAK tidak memberikan dampak langsung terhadap pengurangan ketimpangan maupun pertumbuhan ekonomi inklusif karena penggunaannya lebih berfokus pada pembangunan fisik jangka pendek dan belum menyentuh penguatan ekonomi masyarakat.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Ketimpangan Pendapatan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan koefisien 0,023923 dan nilai signifikansi 0,004. Hal ini berarti semakin besar DBH yang diterima daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan ketimpangan pendapatan. DBH yang berasal dari pajak pusat dan sumber daya alam memberi ruang fiskal lebih luas sehingga pemerintah daerah dapat memperkuat infrastruktur, layanan publik, serta program pengentasan kemiskinan.

Temuan ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal (Oates, 2006) menjelaskan bahwa pelimpahan dana ke daerah akan efektif apabila dikelola sesuai kebutuhan lokal. DBH memperkuat kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Jika pemanfaatannya tepat, transfer ini dapat mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat ekonomi inklusif.

Dalam perspektif teori konvergensi, DBH berperan sebagai instrumen percepatan proses catching-up, yaitu membantu daerah agar mampu mengejar ketertinggalan ekonomi. Pemanfaatan DBH untuk kepentingan publik dan kelompok berpendapatan rendah dapat mempersempit kesenjangan pendapatan antarwilayah.

Hasil ini selaras dengan penelitian (Putra dan Hadi, 2020) yang menunjukkan bahwa DBH meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan infrastruktur. (Brodjonegoro et al., 2002) menegaskan bahwa DBH relatif lebih efektif dibanding DAU karena nilainya berkaitan langsung dengan potensi ekonomi daerah dan mendorong daerah mengoptimalkan sumber penerimaannya sendiri.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif melalui ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat. Model yang terpilih dari penelitian ini adalah Common Effect Model

Hasil analisis regresi data panel yang diperoleh adalah Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan ketimpangan pendapatan sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dana perimbangan dialokasikan untuk mendukung pembangunan daerah, tapi penggunaannya dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masih terbatas. Faktor-faktor seperti perencanaan yang kurang tepat, kurangnya fokus pada program pengurangan ketimpangan, dan keterbatasan kapasitas pengelolaan dana di tingkat daerah menjadi kendala utama.

DAFTAR RUJUKAN

- Aimon, H., Kurniadi, A. P., & Satrio, M. K. (2020). Analysis of inclusive growth in poverty, unemployment and income inequality in west sumatera province: panel error correction model approach. *Jurnal Benefita*, 5(1), 19.
<https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4901>
- Est, E., & São, P. (2012). Time Poverty in Brazil: Measurement and Analysis of its Determinants. *Est. Econ*, 42(2), 285–306.
- Giofano et al. (2024). *Analisis pertumbuhan ekonomi inklusif dalam menurunkan kemiskinan di kabupaten kepulauan talaud*.
- Hapsari, D., S, A., Parulian Hutagaol, M., & Asmara, A. (2013). *Pertumbuhan Inklusif : Fenomena Pertumbuhan Inklusif Di Kawasan Indonesia Bagian Barat Dan Indonesia Bagian Timur* (Vol. 2, Issue 2).
- Hartati. (2021). *Jurnal ekonomi & bisnis sekolah tinggi ilmu ekonomi port numbay jayapura analisis pertumbuhan ekonomi inklusif di indonesia yuniar sri hartati dosen prodi ekonomi pembangunan, sekolah tinggi ilmu ekonomi port numbay*.
- Hunaifi, A. (2022). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Jumlah Penduduk, Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada 6 Provinsi Di Pulau Jawa Indonesia Tahun 2014-2019*.
- Klasen, S. (2010). *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals ADB Sustainable Development Working Paper Series*.
www.adb.org/poverty
- Liu, J., Tang, J., Zhou, B., & Liang, Z. (2018). The effect of governance quality on economic growth: Based on China's provincial panel data. *Economies*, 6(4).
<https://doi.org/10.3390/economies6040056>

- Mahi, B. R. (2019). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Volatilitas Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(1), 118–138. <https://doi.org/10.21002/jepi.2019.07>
- Ncube, M., Anyanwu, J., & Hausken, K. (2013). *Inequality, Economic Growth, and Poverty in the Middle East and North Africa (MENA)*. www.afdb.org/
- Raheem, I. D., Isah, K. O., & Adedeji, A. A. (2018). Inclusive growth, human capital development and natural resource rent in SSA. *Economic Change and Restructuring*, 51(1), 29–48. <https://doi.org/10.1007/s10644-016-9193-y>
- Sihombing et al. (2022). Apakah Dana Desa dan Pendapatan APBD Mempengaruhi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia? <https://doi.org/10.31294/jp.v17i2>